

**LUMPUR LAPINDO BRANTAS INC: KONFLIK KELAS (*CLASS*  
*CONFLICT*) ANTARA PENDEKATAN PSIKOSOSIAL  
DAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK, DIMERIAHKAN DENGAN  
SAYEMBARA PARANORMAL**  
*Oleh: D. Tiala*

**I. Pendahuluan**

Berguna tidaknya suatu teori, sangat tergantung dari kemampuannya untuk menjelaskan fenomena sosial-kemasyarakatan yang dihadapinya. Namun, tidak dapat disangkal, bahwa kekuatan berpikir dan penalaran manusia menjadi kunci utama, untuk membangun dan membongkar teori itu yang pada gilirannya dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia.

Sudah jelas, bahwa meluapnya lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc yang terjadi sejak 28 Mei 2006, membawa dampak psikologis-sosial yang dalam dan berkepanjangan untuk bangsa ini, serta sekaligus hendak mempertanyakan kemampuan sumber daya manusia Indonesia, dengan kemampuan yang dimiliki pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Lumpur panas Lapindo Brantas Inc, sebagai sebuah bencana yang tak terhindarkan selama kurang lebih 8 bulan ini (Mei 2006 s.d. Januari 2007) yang masih terus dinikmati oleh masyarakat Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang juga dalam pemecahannya, dengan tidak berpretensi terlebih dahulu ada semacam tarik menarik antara pemilik Lapindo Brantas Inc (pengusaha) dan penguasa pengambil kebijakan di negeri ini, dengan dimeriahkan oleh panggung kekuatan supranatural, yang konon ceritanya sejumlah 35 paranormal baik yang berasal dari Sidoarjo maupun luar Jawa Timur siap sedia menutup luapan lumpur Lapindo Brantas Inc dengan kekuatan supranatural yang dimiliki, karena yang akan menangani luapan lumpur Lapindo Brantas Inc ini, mereka yang mempunyai kelebihan non teknis untuk menghentikan luapan lumpur Lapindo Brantas Inc.

Dalam kenyataan, apa yang diusahakan dan dikerjakan oleh paranormal lumpur Lapindo Brantas Inc tetap saja meluap dan tidak pernah berhenti. Sementara itu, sekelompok ornop, seperti WALHI belakangan ini mulai mengerahkan pikirannya untuk mencoba memfokuskan diri dalam advokasi pada

faktor-faktor psikososial, dan faktor-faktor ekonomi politik yang tampaknya ikut pula dalam melatarbelakanginya. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk mengungkapkan kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik lumpur Lapindo Brantas Inc yang belum terselesaikan.

Polarisasi pendekatan-pendekatan tersebut di atas, menunjukkan betapa mendalamnya masalah epistemologi, yakni adanya kesenjangan bahkan konflik kepentingan antara pengusaha dan penguasa yang membawa dampak psikososial dan pengaruh kekuatan ekonomi politik dalam pendampingan para korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc terhadap ganti rugi dari apa yang mereka suarakan, sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta agar segera membayar santunan, kompensasi, dan ganti rugi kepada masyarakat dalam bentuk pembelian tanah, bangunan, dan lahan pertanian yang terkena dampak langsung luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. Semburan lumpur dan gas ini mengakibatkan ribuan warga di tiga desa: Jatirejo, Renokenongo, dan Siring, Sidoarjo harus mengungsi karena rumah mereka terendam lumpur. Sekitar 500 warga dirawat di rumah sakit karena menderita sakit saluran pernapasan. Sekitar 100 hektar sawah dengan kualitas tanah sangat baik harus terendam dalam lumpur dan terancam rusak kesuburannya. Jalan tol pun kerap ditutup karena luapan lumpur mencapai jalan tol sehingga membutuhkan pembiayaan untuk memperbaikinya.

## **II. Kontribusi Teori Marx dalam Pendekatan Ekonomi – Politik**

Dasar-dasar teori Ekonomi-Politik Marx, yang dibangun dengan dasar: “Basis dan Suprastruktur” dalam kata pengantarnya untuk “*A Critique of Political Economy*”. Marx menegaskan pandangannya tentang praktek ekonomi sebagai indikator utama untuk menganalisis masyarakat. Dalam karya itu dan karya-karya sesudahnya, Marx berbicara tentang struktur ekonomi sebagai “basis yang sesungguhnya” dari masyarakat. Di atas basis itulah, berdiri Suprastruktur politis, legal dan kultural serta “bentuk-bentuk kesadaran yang sesungguhnya”.<sup>1</sup> Mudah sekali untuk menyadari dan dipahami, bahwa representasi struktur dari setiap

---

<sup>1</sup> Aditjondro, George Junus. Dasar-Dasar Teori Ekonomi Marxis. PSIRB 301, Marxisme: Religi, Politik & Ideologi, Handout 3, Yogyakarta: 2005

masyarakat sebagai suatu bangunan yang memuat basis (*infrastruktur*), yang di atasnya berdiri dua lantai suprastruktur.

Ada dua kontribusi dari Marx dalam analisisnya terhadap masyarakat kapitalis. *Pertama*, kapitalisme menyebabkan proses pemiskinan (*pauperization*) secara progresif dari kaum proletar, sehingga satu saat mereka akan menjalankan tugas revolusionernya, dan karenanya akan mengambil alih kekuasaan negara. *Kedua*, bahwa kapitalisme akan terus menerus mengakibatkan alienasi kaum buruh dari produknya, dari proses produksinya, dari jati dirinya, dan juga dari komunitasnya.

Proses berpikir Marx tentang alienasi (keterasingan) adalah sebagai berikut: *Pertama*, keterasingan manusia terhadap barang-barang ciptaannya. *Kedua*, keterasingan manusia terhadap dirinya sendiri, karena lama-kelamaan manusia merasakan dirinya hanya sebagai sebuah benda di tengah benda-benda lain yang ia ciptakan. Ia bahkan tergantung pada benda-benda itu untuk dapat berhubungan dengan dirinya sendiri.<sup>2</sup> Dengan demikian, alienasi telah melanda manusia sendiri baik secara pasif maupun reseptif sebagai subyek yang terpisah dari obyek. Alienasi, yang dimaksudkan oleh Marx juga berarti bahwa manusia tidak mengalami dirinya sebagai pelaku ketika menguasai dunia, tetapi juga berarti bahwa dunia (alam, benda-benda dan manusia sendiri) tetap asing bagi manusia, *species being*-nya.<sup>3</sup>

Dalam permasalahan luapan lumpur Lapindo Brantas Inc, menunjukkan bahwa pada gilirannya manusia tetap terasing bagi dirinya karena apa yang menjadi milik pribadinya telah berpindah menjadi kepemilikan modal kapitalis.

Ahli Hukum Agraria Universitas Airlangga, Agus Sekarmaji mengatakan, status jual beli tanah antara korban lumpur panas dengan Lapindo Brantas Inc menyimpan potensi masalah akan hal tersebut. Menurutnya, tanah warga korban lumpur sebelumnya berstatus hak milik. Dengan berdasar Undang-Undang Pokok

---

<sup>2</sup> Baskoro T. Wardoyo. Marx Muda. Marxisme Berwajah Manusia. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik. 2003, 36 – 37.

<sup>3</sup> Marx ingin membedakan manusia dengan binatang. Manusia mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan alam untuk berkarya secara universal, penuh dan bebas untuk terus menerus mencipta obyek-obyek sesuai dengan atandar-standar yang berlaku.

Agraria atau UU Nomor 5 Tahun 1960, hanya ada dua subyek hukum yang boleh memiliki tanah dengan status hak milik, yaitu warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu. Badan hukum yang boleh memiliki tanah diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 1963 seperti: bank, koperasi, dan badan hukum yang bertujuan sosial. Lapindo Brantas Inc tidak termasuk dalam perusahaan itu.

Berdasar aturan ini, maka Lapindo Brantas Inc sama sekali tidak memiliki hak atas bekas tanah warga itu. Jika, tanah itu akan dilepaskan hak miliknya oleh pemilik, status tanah dari bangunan di atasnya berubah dari hak milik menjadi tanah negara. “Negara hanya menguasai, tetapi tidak memiliki”. Yang dilakukan Lapindo Brantas Inc dan warga, bukan jual beli tanah, tetapi pelepasan dan penyerahan oleh kedua pihak. Apabila Lapindo Brantas Inc ingin beraktivitas di atas tanah itu, menunggu surat keputusan dari pemerintah. Maka ini berarti, bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, hak yang bisa diperoleh Lapindo Brantas Inc atas bekas tanah warga itu adalah hak guna usaha atau hak guna bangunan.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa keterasingan manusia terhadap dirinya sendiri yang pada gilirannya manusia merasakan dirinya hanya sebagai sebuah benda di tengah benda-benda lain yang diciptakan. Tanah dan bangunan, serta usaha-usaha produksinya menjadi milik para kapitalis dan karena itu ia senantiasa menjadi terasing dari produksinya. Rumah dan sawah warga diterjang lumpur panas, yang mengeluarkan belerang yang menyesakkan pernafasan warga.

Dalam pandangan ekonomi politik, dengan masalah Lapindo Brantas Inc, berusaha untuk mengungkap konsekuensi logis ekonomis dari permasalahan-permasalahan politis, dengan mempertanyakan siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Peristiwa luapan lumpur Lapindo Brantas Inc mau tidak mau yang beruntung adalah pengusaha, penguasa dengan hasil kerjasama secara sistematis, dan yang pasti merugi adalah warga masyarakat sebagai pemilik lahan. Apalagi persoalan ganti rugi dikesankan sebagai proses tawar-menawar yang berjalan sepihak dan hasilnya baru diumumkan kepada warga yang terkena luapan lumpur Lapindo Brantas Inc.

Dalam berbagai studi ekonomi politik, pertambangan di Indonesia sebagai konsep “Kelas Komprador Domestik”. Ada tiga kelompok yang masuk dalam “KKD” ini, yakni (a). orang-orang di sekitar pusat kekuasaan, terutama Presiden, Wakil Presiden dan orang-orang sekitarnya; (b). para pengusaha yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, termasuk para lobbyist, pelobi kepentingan sektor-sektor ekonomi tertentu; dan (c). para politisi yang memegang kekuasaan di partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup>

Dengan demikian, Kelas Komprador Domestik itu digambarkan sebagai suatu oligarki. Oligarki ini semakin solid saja kekuasaannya, apabila alat-alat represif dari negara, khususnya militer, sekaligus menguasai prasarana politik, prasarana ekonomi, dan istana. Di Indonesia pun, kita sudah saksikan bagaimana sektor-sektor pertambangan migas dan timah pernah dikuasai mantan gerilyawan yang bermetafora menjadi pengusaha dan politisi.<sup>5</sup>

### **III. Konflik Kepentingan: Pengusaha, Penguasa (Aparatus Negara) yang berdampak pada Warga Masyarakat Sidoarjo**

Para penganut aliran sosiologi konflik memberikan definisi tentang konflik dalam berbagai versi, akan tetapi esensinya sama yaitu terjadinya perlawanan antar individu maupun kelompok berbagai kepentingan yang ada. Kepentingan, terdiri dari: kepentingan yang belum kelihatan (*latent interest*) dan kepentingan yang nyata (*manifest interest*).<sup>6</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu, antara lain: kebencian, kecemburuan, kebutuhan, dan keinginan. Menurut Simmel, konflik dilakukan untuk mengatasi perbedaan yang sifatnya dualistis. Di satu sisi, konflik dimaksud untuk menciptakan persatuan, namun di sisi lain justru dapat merupakan aksi

---

<sup>4</sup> Aditjondro, George Junus. Burung-Burung Kondor beterbangan di atas bumi Sulawesi: Kapitalisme Ekstraktif, Imperialisme Mineral, dan Peranan Kelas Komprador Domestik dalam Industri Pertambangan di Indonesia. Kata Pengantar dalam Arianto Sangaji, Buruh Indo, Rakyat digusur: Ekonomi-Politik Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, hal. Ix-xxii

<sup>5</sup> Aditjondro, George Junus. Bumi Terkelupas, Ikan Menggelepar, Penduduk Terkapar: Dampak Seperempat Abad Korporasi-Korporasi Tambang di Indonesia. Jakarta: Konphalindo.

<sup>6</sup> Dahrendorf, R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford University Press, California. 1959.

penghancuran kelompok lain yang dianggap musuh.<sup>7</sup> Dalam pengembangan penulisan makalah ini, penulis menyampaikan konflik kelas (*class struggle*) menurut Marx dan Engels dalam bukunya Manifesto Komunis tahun 1867 yang disampaikan oleh Aditjondro, George Junus dalam Handout kuliah Marxisme: Religi, Politik & Ideologi, lebih mempertegas bahwa “Sejarah dari masyarakat-masyarakat yang dapat dicatat adalah sejarah konflik kelas .....penindasan dan yang ditindas, selalu berdiri berhadap-hadapan, dan terus terlibat dalam konflik satu sama lain, kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang terbuka, konflik yang berakhir dalam perombakan struktur masyarakat secara revolusioner dalam kehancuran bersama dari kelas-kelas yang saling bertentangan.”<sup>8</sup>

Dalam hubungan dengan luapan lumpur Lapindo Brantas Inc dapat dilihat bahwa konflik kepentingan itu terjadi antara pengusaha, penguasa, dan warga masyarakat. Proses tawar menawar ganti-rugi menjadi persoalan yang pelik karena ada semacam persekongkolan yang dapat dilihat di antara pengusaha dan penguasa yang berdampak pada warga masyarakat. Tak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2006 untuk penanganan luapan lumpur Lapindo Brantas, yang akibatnya banyak yang bertanya tentang nasib korban setelah berakhirnya keppres. Lebih tragisnya lagi, tumpang tindihnya Keppres di satu sisi dengan Instruksi Presiden di sisi lain, sesuai Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semua pendanaan atas penanggulangan semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo ditanggung Lapindo Brantas Inc. Artinya, selain memberikan kompensasi atas dampak sosial, Lapindo Brantas Inc juga harus membiaya upaya penanggulangan lumpur di permukaan dan penghentian semburan. Termasuk di dalamnya membayar peralatan dan material yang diperlukan, serta sumber daya manusianya.

Wakil Presiden Yusuf Kalla pun ikut bicara dengan menyatakan, siapapun pemilik PT Lapindo Brantas Inc yang baru, dia harus bertanggungjawab terhadap kerugian sosial yang ditimbulkan akibat semburan lumpur panas di salah satu sumur eksplorasi di Porong, Sidoarjo. “Lapindonya kan tidak pergi? Yang jelas

---

<sup>7</sup> Simmel, G. Conflict and The Web of Group Affiliations. The Free Press, New York: 1964.

<sup>8</sup> Aditjondro, George, Junus. Kelas, Kepentingan Kelas, Konflik Kelas. PSIRB 301. Marxisme: Religi, Politik & Ideologi, Handout 2. Yogyakarta: 2005

yang bertanggungjawab terhadap negara adalah Lapindonya, meskipun pemiliknya berganti-ganti. Apalagi sudah ada Keputusan Presidennya yang menetapkan kerugian itu”. Mengenai penjualan seluruh saham Lapindo Brantas Inc kepada Freehold Group Limited, itu urusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Karena penjualan itu legal, itu urusan Bapepam, karena itu silahkan saja bertanya pada Lapindo Brantas Inc.

Kasus yang menarik ini, akhirnya ramai-ramai ikut bicara dengan versinya masing-masing, biar membangun kesan, ada kepedulian terhadap kepentingan warga masyarakat. DPR dan DPRD Jawa Timur pun ikut berbicara, mendesak kepolisian mengusut kasus semburan lumpur Lapindo Brantas Inc, dan minta PT Lapindo Brantas Inc bertanggungjawab. Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo minta agar Lapindo Brantas Inc dan BP Migas nantinya harus bertanggungjawab atas musibah semburan lumpuran panas di desa Renokenongo, kecamatan Porong. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, mempersilahkan kepolisian untuk mengusut kasus meluapnya lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc di desa Siring, kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur sesuai prosedur yang berlaku. “Silahkan usut kasus Lapindo Brantas Inc, karena yang menentukan penyidikan dan pengusutan adalah aparat kepolisian, tanpa harus ada ijin dari Menteri ESDM”. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar: “Hentikan Lapindo Brantas”, kementerian yang dipimpinnya akan merekomendasikan agar operasi PT Lapindo Brantas Inc tidak dilanjutkan. Rekomendasi itu, didasarkan pada semburan lumpur panas yang membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan menghentikan sejumlah aktivitas ekonomi. Hanya ada soal yang menarik, kontradiksi dalam pernyataan Rachmat Witoelar. Pernyataannya seperti ini: “Kita pada saatnya akan mengambil kesimpulan kurang lebihnya menghentikan operasi PT Lapindo Brantas. Kita lihat kerugian yang ditimbulkan seperti itu, kasat mata. Kalau kita hentikan sekarang, keenakan mereka bisa lepas dari tanggungjawab”.

Karena berlarut-larutnya pengusutan yang ditunding kepada pihak aparat kepolisian, apa reaksi kepolisian, Kapolri dan jajarannya sampai kini belum juga tuntas dalam penyidikan, berlari di tempat, dan belum kelihatan hasilnya sembari memberi pernyataan: “Siapapun yang terlibat akan diperiksa. Kalau

pemeriksaannya terkesan lambat, karena faktor teknis memang tidak bisa cepat. Polisi perlu mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi, termasuk saksi ahli”. Masih menurut Kapolri, masalah lumpur panas Lapindo Brantas Inc saat ini masih sedang dalam penyelidikan Polda Jatim, apakah ada unsur pidana atau pelanggaran hukum lainnya, seperti pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup. “Polda sudah memeriksa 27 orang saksi. Tetapi belum ada tersangka, karena penyidik masih harus melengkapi data, termasuk meminta dokumen kepada Lapindo Brantas Inc, seperti dokumen kerja sama dan dokumen eksplorasi. Mabes Polri hanya mem-*back-up*”.

Ada persekongkolan yang manis di antara pengusaha, penguasa dan kepentingan-kepentingan ekonomi-politik, sehingga belum tuntasnya luapan lumpur Lapindo Brantas Inc.

Di mana PT Bakrie Capital? Adalah Direktur Utama PT Bakrie Capital, Iwan Jarot, mengatakan: Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Rachmat Witoelar, telah menegaskan, bahwa: “lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo tak berbahaya dan bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi bahan konstruksi dan bangunan seperti batu bata, batako, genteng, *cone block* dan *paving block*”.

#### **IV. Bagaimana dengan Aliran Ekonomi Global**

Teori-teori masyarakat pascaindustri atau masyarakat informasi memang telah menunjukkan kegunaannya dalam menerangkan berbagai perubahan kunci di masyarakat. Meski demikian, teori-teori tersebut juga masih menyisahkan berbagai permasalahan. Dalam konteks ekonomi global, kelas yang dominan tentu saja bukanlah para penentu kebijakan ekonomi di dalam negeri, melainkan para penguasa maskapai transnasional (*transnational corporations*).<sup>9</sup>

Di Indonesia hampir banyak masalah dalam ekonomi, penguasa hanyalah merupakan kepanjangan tangan dari para kapitalis internasional yang membawa konsekwensi pada perubahan-perubahan struktur ekonomi politik di dalam negeri yang membawa kesengsaraan dan penderitaan. Biasanya pada kelompok kelas

---

<sup>9</sup> Ibid+



proletar keberuntungan itu jauh dari harapan, sedangkan kelompok kaum borjuasi yang menikmati segala sumber kekayaan dalam negeri.

Kemunculan dan perkembangan aktivitas ekonomi global bukan hal yang sepenuhnya baru. Pada umumnya dikatakan bahwa sejak awal tahun 1970-an globalisasi mengalami percepatan (akselerasi), yang ditandai oleh adanya dimensi baru pengerutan (kompresi) ruang dan waktu. Hal ini didorong oleh pencarian perusahaan transnasional akan sumber-sumber keuntungan baru, di bawah ancaman krisis Fordisme. Riset global mempercepat terjadinya pembaruan globalisasi aktivitas ekonomi dunia, termasuk usaha untuk mempersingkat waktu turnover produksi dan konsumsi yang dimungkinkan oleh penggunaan teknologi informal dan komunikasi. Jadi, istilah globalisasi yang dipercepat mengacu pada sekumpulan aktivitas ekonomi sebagai praktik-praktik kapitalisme dalam era “ter-disorganisasi”.

Para ekonom Marxis di Amerika Serikat dengan serta merta menggunakan istilah itu untuk menunjukkan bagaimana sistem ekonomi kapitalis lanjut yang diperjuangkan sebagai atau menjadi negara kesejahteraan. Penerapan di Indonesia, berbeda dengan praktek kapitalis yang sekedar berpusat pada pemenuhan kebutuhan dari warga masyarakat yang terkena dampak akibat suatu perubahan, tanpa harus mempertimbang perkembangan lebih lanjut dari masyarakat itu sendiri. Karena itu, ketika industrialisasi masuk dan memulai produksi, warga masyarakat sudah pasti tidak akan mendapat kebahagiaan bahkan kesengsaraan karena hak-hak produksinya dirampas oleh para kapitalis.

Kasusu Lapindo Brantas Inc memberi contoh dan sekaligus pembelajaran kepada kita betapa kepentingan-kepentingan ekonomi global bermain di sana sebagai kapitalis-kapitalis besar yang mempunyai modal besar pula, sementara ekonom dan kapitalis dalam negeri menjadi alat yang dapat menjadi robot dengan gerak *remote control* transnasional semuanya dapat diatur.

Belakangan ini, dalam rush para pelaku bisnis top di Indonesia untuk mendapat bagian dalam berbagai kegiatan bisnis, seperti contoh pada perusahaan PT Lapindo Brantas Inc, ada semacam konsesi dengan lingkaran kekuasaan.

## V. Penutup

Dalam makalah ini, telah saya uraian berbagai hal yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi politik dalam kasus Lapindo Brantas Inc di mana akan menjadi suatu penjelasan menarik, ketika ada kepentingan-kepentingan pengusaha dan penguasa dan yang mendapat dampak dari kasus yang kian tarik menarik semakin kencang sekalipun sudah melalui pengontrolan, kian menjadi kesenjangan dan jurang yang lebar pada masyarakat lapis bawah.

Kondisi semacam ini, maka dapatlah dipastikan warga masyarakat sebagai dan yang berada pada kelas bawah tidak selalu akan mendapat keuntungan karena permainan dari pelaku-pelaku pebisnis yang bebas dari jeratan, akibat tarik menariknya penguasa, penguasa dan para elit politik yang bermain di dalamnya. Sudah barang tentu, kelas dan konflik kelas akan semakin dilestarikan dengan tidak adanya kepastian untuk mendapatkan haknya.

## KEPUSTAKAAN

Aditjondro, George Junus. *Dasar-Dasar Teori Marx*. PSIRB, Marxisme: Religi, Politik & Ideologi. Yogyakarta: 2005

----- . *Burung-Burung Kondor Beterbangan di atas Bumi Sulawesi: Kapitalisme Ekstraktif, Imperialisme Mineral, dan Peranan Kelas Komprador Domestik dalam Industri Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

----- . *Bumi Terkelupas, Ikan Menggelepar, Penduduk Terkapar: Dampak Seperempat Abad Korporasi-Korporasi Tambang di Indonesia*. Jakarta: Konphalindo.

----- . *Kelas, Kepentingan Kelas, Konflik Kelas*. PSIRB 301: Marxisme: Religi, Politik & Ideologi. Yogyakarta 2005.

Baskoro T. Wardoyo. *Marx Muda. Marxisme Berwajah Manusia*. Yogyakarta. Penerbit Buku Baik: 2003.

Daherndorf, R. *Class and Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press, California: 1959.

Simmel, G. *Conflict and The Web of Group Affiliations*. The Free Press, New York: 1964.